

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Anastasia Diana & Lilis Setiawati, 2004, *Pedoman & Cara Pengisian SPT PPH Pasal 21*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.

Budi Winarno, 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, MEDPRESS (Anggota IKAPI), Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik dan Kantor Litbanglahtasipda Kab Kudus, 2006, *Kudus Dalam Rangka Kudus In figures*, Badan Pusat Statistik Kab.kudus.

Djoko Mulyono, 2007, *Pemotongan Pemungutan PPH & PPH Pasal 25/29 Lengkap Dengan Undang-Undang*, CV Andi Offet, Yoryakarta.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2011, *Modul Sosialisasi Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB Menjadi Pajak Daerah*, Jakarta.

Dirjen Keuangan Daerah, 2011, *Peluang dan Tantangan Pengalihan BPHTB dan PBB-P2 Menjadi Pajak daerah*, Jakarta.

Dirjen Pajak, 2011, *Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah*, Jakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas (Pengantar Djoko Slamet Surjoputro), 2009, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban*, Jakarta.

Daniel Goleman, et.all, 2005, *Primal Leadership Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ermaya Suradinata, 2006, *Otonomi daerah dan Paradigma Baru Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Politik dan Bisnis*, Suara Bebas, Jakarta.

Erly Suandy, 2001, *Panduan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (Brevet Pajak)*, Salemba Empat (PT Salemba Emban Patria), Jakarta.

Gustian Djuanda, et.all, 2006, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

I.P.M. Ranuhandoko, 2006, *Terminologi Hukum Inggris – Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Iis Isnawati (Pemateri), *Buku Panduan Pajak, Lebih Dekat Dengan Pajak Wujudkan Masyarakat Sadar dan Peduli Pajak*, Kudus (Tanpa Tahun)

Julia Brannen, 2005, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda, Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, 2007, *Teori Metodologi Penelitian hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Joko, 2009, *Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 Dilengkapi Prosedur Administrasi Perpajakan, Panduan Membuat KK., KTP,*

Akta Lahir, Akta Pernikahan, Akta Perceraian, NPWP, IMB, SIUP, Izin Gangguan (HO) dan Sertipikat Tanah, New Merah Putih, Yogyakarta.

Masrukin, 2010, *Metode Penelitian Pendidikan dan Kebijakan*, Media Ilmu Press, Kudus.

Moelyono Hadi, 2001, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pusat dan Daerah*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

Mardiasmo, 2006, *Perpajakan*, Andi, Yogyakarta.

Noeng Muhadjir, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Rake Sarasni, Yogyakarta.

Philipus M. Hadjon, et.all, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia Introduction To The Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Penyuluhan dan Penangan Potensi Pepajakan, *Pajak Penghasilan*, Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Niti Semito Kudus, Tanpa tahun dan No.Hal.

Suparno, 2007, *Hukum Perpajakan Suatu Sketsa Asas*, Pustaka Magister Semarang -UMK Press, Kudus.

Surjadi, 2009, *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, Refika Aditama, Bandung.

Sulistiyowati Irianto & Sidharta, 2009, *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (PDRD).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.

Depdagri RI, 2004, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, Cahaya Ilmu, Surabaya.

Pemprof Jateng, 2010, *Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan*, Biro Tata Pemerintahan Setda Propinsi Jawa Tengah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bagian Pemdes Sekda Kab Kudus, 2000, *Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus*, Kudus.

Website :

[Http://www.ut.ac.id/html/suplemen/empa_4524/BAB-II.swf](http://www.ut.ac.id/html/suplemen/empa_4524/BAB-II.swf)

